

KONDISI OBJEKTIF PENDIDIKAN DI INDONESIA

ABDUL MUID,¹Daffa Muhammad Al Irsyad², Dul Mufid³

Abstraksi:

Dunia Pendidikan terus berubah. Kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat terus menerus berubah, apalagi di dalam dunia terbuka, yaitu di dalam dunia modern dalam era globalisasi. Kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang dalam lembaga pendidikan haruslah memenuhi standar. Tinjauan terhadap standarisasi dan kompetensi untuk meningkatkan mutu pendidikan akhirnya membawa kita dalam pengungkapan adanya bahaya yang tersembunyi yaitu, kemungkinan adanya pendidikan terkekang oleh standar kompetensi saja sehingga kehilangan makna tujuan pendidikan tersebut. Karena itu, Pendidikan di Indonesia harus memenuhi unsur Pemerataan, Keadilan, Obyektif, dan Kompetitif. Sekolah yang belum Memenuhi Standar keadilan, perlu Mendapatkan Perhatian Pemerintah, karena Pemerintah yang mempunyai User anggaran.

Kata Kunci: Kondisi Obyektif, Pendidikan di Indonesia.

BAB I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya pendidikan adalah laksana eksperimen yang tidak pernah selesai sampai kapanpun, sepanjang ada kehidupan manusia di dunia ini. Dikatakan demikian, karena pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang terus berkembang. Hal ini sejalan dengan pembawaan manusia yang memiliki potensi kreatif dan inovatif dalam segala bidang kehidupan. Bagi bangsa Indonesia krisis multidimensi membawa hikmah dan pelajaran yang luar biasa besarnya, yang pasti bangsa ini dapat menatap dan membangun masa depan dengan semangat yang lebih optimis. Masa lampau memperjelas pemahaman kita tentang masa kini. Sistem pendidikan yang kita kenal sekarang adalah hasil perkembangan pendidikan yang tumbuh dalam sejarah pengalaman bangsa kita.

¹ Adalah Pengasuh Pondok Pesantren Maziyatul Ilmi Gresik, Anggota Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik, Pengurus Aswaja Center PCNU Gresik, Pengurus DMI Gresik Kabid Pendidikan Teknologi dan, Kebudayaan, Anggota Komnasdik Kabupaten Gresik, Dosen Universitas Qomaruddin, dosen STAI Arrosyid Surabaya, Pengasuh di Pondok Pesantren Al-Furqon NU Driyorejo Gresik.

² Mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik

³ Mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik

Pada masa yang telah lewat, dunia pendidikan terus berubah. Kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat terus menerus berubah, apalagi di dalam dunia terbuka, yaitu di dalam dunia modern dalam era globalisasi. Kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang dalam lembaga pendidikan haruslah memenuhi standar. Tinjauan terhadap standarisasi dan kompetensi untuk meningkatkan mutu pendidikan akhirnya membawa kita dalam pengungkapan adanya bahaya yang tersembunyi yaitu, kemungkinan adanya pendidikan terkekang oleh standar kompetensi saja sehingga kehilangan makna tujuan pendidikan tersebut. Untuk itu penulis mengangkat judul kondisi objektif pendidikan di Indonesia. Dalam Artikel ini juga di jelaskan kondisi pendidikan di Indonesia hingga era globalisasi saat ini.

B. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan Artikel ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi pendidikan sebelum masa kemerdekaan.
2. Untuk mengetahui kondisi pendidikan di Indonesia pada masa orde lama (1945-1969).
3. Untuk mengetahui kondisi pendidikan di Indonesia pada zaman PJP I (1969-1993).
4. Untuk mengetahui kondisi pendidikan di Indonesia pada era globalisasi.

BAB II. KAJIAN PEMBAHASAN

OBJEKTIF PENDIDIKAN DI INDONESIA

A. Kondisi Pendidikan Sebelum Kemerdekaan

Sebelum kemerdekaan kondisi pendidikan di Indonesia dibagi atas beberapa zaman, yaitu zaman purba, zaman kerajaan Hindu-Budha, zaman kerajaan Islam, zaman Portugis dan Spanyol, zaman kolonial Belanda, dan zaman kedudukan Jepang. Untuk lebih jelasnya, akan kita bahas satu-persatu.

1. Zaman Purba

Pada zaman ini kebudayaan yang berkembang pada penduduk asli disebut kebudayaan paleolitik (kebudayaan lama atau tua), seperti yang dapat dijumpai pada suku kubu, wedda, dan negrito. Ciri-ciri kebudayaannya adalah tergolong kebudayaan maritim. Kepercayaan yang dianut antara lain, Animisme dan Dinamisme. Tata masyarakatnya bersifat egaliter, tidak stratifikasi sosial yang tegas, mereka hidup bergotong royong.

Pada zaman ini, pendidikan bertujuan agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri dan hidup bermasyarakat, yaitu mempunyai semangat gotong-royong, menghormati para empu, dan taat terhadap adat. Kurikulum pendidikannya meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan mengenai keagamaan melalui upacara-upacara keagamaan dalam rangka menyembah nenek moyang.

Pendidikannya terutama adalah ayah dan ibu mereka sendiri, dan secara langsung adalah para orang dewasa di dalam masyarakatnya. Jika ada yang belajar kepada empu jumlahnya sangat sedikit, utamanya adalah anak-anak mereka sendiri.⁴

2. Zaman kerajaan Hindu-Budha

Dengan masuknya pengaruh Hindu-Budha, adat di negara kita pun berubah. Mulai ada pembagian kasta dalam masyarakat. Kondisi pendidikannya berlangsung pendidikan informal di dalam keluarga. Selain itu, berkembang juga pendidikan yang lembaganya berbentuk pesantren. Pada awalnya yang menjadi pendidik adalah kaum Brahmana, kemudian para empu juga menggantikan kaum Brahmana.

⁴ A.M.Irfan Taufan Asfar, A.M.Iqbal Akbar Asfar, "*PENDIDIKAN MASA RENAISSANCE: Pemikiran dan Pengaruh Keilmuan*".

Tujuan pendidikan umumnya adalah agar para peserta didik menjadi penganut agama yang taat, mampu hidup bermasyarakat sesuai tatanan masyarakat yang berlaku saat itu, mampu membela diri dan negara. Kurikulumnya meliputi agama, bahasa sansekerta, termasuk membaca dan menulis, keterampilan memahat dan membuat candi serta bela diri.⁵

3. Zaman Kerajaan Islam

Pada pertengahan abad ke-14, kota Bandar Malaka ramai dikunjungi para saudagar dari Asia Barat dan Jawa atau Majapahit. Melalui saudagar dari Asia Barat inilah, maka Islam masuk ke Indonesia dan tersebar.

Pada umumnya tujuan pendidikan saat itu adalah menghasilkan manusia yang takwa kepada Allah SWT selamat di dunia dan akhirat. Melalui pelaksanaan iman, ilmu dan amal. Kurikulumnya tidak tertulis secara formal. Pendidikan berisi tentang tauhid, Al-Qur'an, Hadist, Fiqih, Bahasa Arab, termasuk membaca dan menulis huruf Arab. Selain berlangsung dalam keluarga, pendidikan berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan lainnya, yaitu di langgar-langgar, masjid dan pesantren.⁶

4. Zaman Portugis dan Spanyol

Pada awal abad ke-16 yang datang ke negeri kita adalah bangsa Portugis, kemudian disusul oleh bangsa Spanyol. Selain untuk berdagang kedatangan mereka juga disertai oleh missionaries yang bertugas menyebarkan agama khatolik.

Tujuan pendidikan pada zaman ini adalah untuk menyebarkan agama khatolik. Kurikulum pendidikannya berisi tentang agama khatolik, ditambah pelajaran membaca, menulis dan menghitung. Umumnya pendidikan diberikan kepada anak-anak masyarakat terkemuka.⁷

5. Zaman Kolonial Belanda

Bangsa belanda datang ke negeri kita pada tahun 1596. Orang belanda datang ke Indonesia bukan untuk menjajah, namun untuk berdagang dan menyebarkan agama kristen. Akan tetapi mereka diliputi hasrat untuk meraih untung yang besar hasil rempah-rempah di Indonesia. Politik pendidikan yang bertujuan untuk membentuk

⁵ Okhaifi Prasetyo, "Pendidikan Indonesia Pada Masa Prasejarah Dan Hindu-Budha", Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan, 8 (2), 2021, hal. 180.

⁶ Muhammad Rifa'i, *Sejarah Pendidikan Nasional Dari Masa Klasik Hingga Modern* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011).

⁷ Uyoh Sadulloh and Ocih Setiasih, "Landasan Historis Pendidikan," Landasan Pendidikan (2016): 206.

pegawai administrasi yang rendah merupakan inti politik kolonial.

Luas dan jenis pendidikan yang disediakan oleh pemerintah Belanda bagi anak-anak Indonesia banyak ditentukan oleh tujuan politik belanda terutama dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomis. Tak mungkin mempelajari masalah-masalah pendidikan di Indonesia pada zaman kolonial lepas dari masalah ekonomi. Tujuan pendidikan pada zaman ini adalah untuk menghasilkan pegawai administrasi rendah di pemerintah dan gereja. Tujuan lainnya adalah menyebarkan agama kristen. Walaupun tidak ada kurikulum yang ditentukan, biasanya sekolah menyajikan pelajaran-pelajaran tentang katekismus, agama, jugabmembaca dan menulis. Demikian pula tidak ditentukan lama belajar. Pada saat itu belum terdapat pengajaran klasikal atau pengajaran secara berkelompok. Mengajar tetap berdasarkan pengajaran individual. Murid-murid datang seorang diri ke meja guru dan menerima bantuan individual.⁸

6. Zaman Kedudukan Jepang

Kekuasaan kolonial belanda berakhir pada tanggal 8 maret 1942 menyerah pada Jepang. Jepang pun menyerbu Indonesia karena kekayaan alamnya. Tujuan dan isi pendidikan diarahkan demi kepentingan perang Asia Timur atau pendudukan jepang dengan menyediakan tenaga kerja kasar secara cuma cuma yang dikenal dengan romusha.

Kondisi pendidikan pada zaman belanda, sekolah bersifat terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat. Hanya satu jenis sekolah rendah diadakan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam pendidikan jepang inilah pertama kalinya bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam belajar. Sedangkan bahasa Belanda dilarang untuk digunakan.

B. Kondisi Pendidikan Pada Masa Orde Lama (1945-1969)

1. Zaman Revolusi Fisik Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan UUD 1945 yang mana di dalamnya memuat Pancasila sebagai dasar negara. Sejak saat ini jenjang dan jenis pendidikan mulai di sempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Bersamaan dengan berjalannya

⁸ *Ibid*

revolusi fisik, pemerintahan mulai mempersiapkan sistem pendidikan nasional sesuai amanat UUD 1945. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan (PP dan K) mengeluarkan instruksi umum agar para guru membuang sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan patriotisme.

2. Peletakan Dasar Pendidikan Nasional

Mulai tanggal 18 agustus 1945, sejak PPKI menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang di dalamnya memuat pancasila, implikasinya bahwa sejak saat itu dasar sistem pendidikan nasional kita adalah pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Nasional Indonesia tetap dilaksanakan sesuai jiwa UUD 1945, dan bahwa UU RI No. 4 Tahun 1950 De Facto digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan untuk seluruh daerah NKRI.

3. Demokrasi Pendidikan

Sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU RI No. 4 tahun 1950, meskipun menghadapi berbagai kesulitan, pemerintah mengusahakan terselenggaranya pendidikan yang bersifat demokratis, yaitu kewajiban belajar sekolah dasar bagi anak-anak yang berumur 8 tahun. Oleh karena pelaksanaan kewajiban belajar ini menghadapi masalah kekurangan guru dan jumlah sekolah maka berdasarkan keputusan menteri pendidikan No.5033/F tanggal 5 Juli 1990 didirikanlah Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar kepada Kewajiban Belajar (KPKPKB).

4. Lahirnya LPTK pada tingkat Universitas

Apabila dalam pelaksanaan kewajiban belajar SD telah menimbulkan KPKPKB, SDB, dan SGA, maka untuk suplai guru sekolah menengah dilaksanakan melalui PGSLP serta kursus BI dan kursus BII untuk guru sekolah lanjutan atas. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan maka atas dorongan Prof. Moh. Yamin pada tahun 1945 didirikanlah perguruan tinggi pendidikan guru (PTPG) di 4 tempat, yaitu di Batusangkar, Bandung, Malang, dan Tondano.

5. Lahirnya Perguruan Tinggi

Antara tahun 1949-1961 pemerintah Indonesia telah mendirikan berbagai PT. Pada tanggal 4 Desember 1961 lahir UU No. 22 tahun 1961 tentang perguruan tinggi. Pokok-pokok yang menonjol dalam UU ini yang sampai sekarang masih dipertahankan

adalah prinsip Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.⁹

C. Kondisi Pendidikan pada PJP 1 : 1969-1993

Pembangunan jangka panjang pertama, meliputi lima pelita, yaitu pelita I-V yang dimulai pada tahun 1969/1970 hingga tahun 1993/1994 atau 25 tahun. Selama kurun tersebut, pendidikan Indonesia mengalami banyak bahan dan kemajuan.

1. UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dalam rangka membangun sistem pendidikan nasional yang mantap keberadaan UU no. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional (UU SPN) merupakan acuan penting yang patut di catat UU SPN yang disahkan pada tanggal 27 Maret 1989 mengatur berbagai aspek dan bidang pendidikan, yaitu dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan, hak warga negara dalam pendidikan, satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, serta didik, tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, peran serta masyarakat, badan pertimbangan pendidikan nasional (BPPN), pengelolaan, pengawasan, dilengkapi ketentuan pidana dan ketentuan peralihan, jadi cakupannya cukup konferensif.

2. Taman Kanak-Kanak

Sejak pelita I hingga akhir pelita V, pendidikan di TK mengalami perkembangan yang cukup mengesankan yang di tandai oleh kenaikan jumlah anak didik, guru, dan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat khususnya orang tua semakin menyadari akan pentingnya pendidikan prasekolah sebagai wahana untuk menyiapkan anak dalam segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan guna memasuki sekolah dasar.

3. Pendidikan Dasar

Prestasi yang sangat mengesankan yang dicapai selama pembangunan jangka panjang pertama (PJP I) ialah melonjakkan jumlah peserta didik pada sekolah dasar (SD) madrasah IBTIDAYAH (MI) yang merupakan penggal pertama pendidikan dasar 9 tahun. Namun, keberhasilan yang dicapai tersebut masih di hadapkan pada berbagai kendala, antara lain masih tingginya angka putus sekolah dan angka tinggal kelas. Mutu

⁹ Salsabiil Rihhadatul Aisy, Hudaidah. "Pendidikan Indonesia di Era Awal Kemerdekaan Sampai Orde Lama". Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 3 No 2 Tahun 2021

pendidikan tingkat SD belum begitu tinggi disamping terdapat keragaman yang luas pada mutu pendidikan antara sekolah-sekolah yang berada pada lokasi geografis yang berbeda-beda.

Pada tingkat SLTP, untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia hingga minimal berpendidikan SLTP maka pada tanggal 2 Mei 1994 program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di canangkan.

4. Pendidikan Menengah

Pada jenjang SLTA, selama PJP I terjadi kenaikan yang luar biasa pada jumlah siswa, yaitu dari 0,7 juta pada awal tahun pelita I menjadi 4,1 juta siswa. Persoalan yang menonjol pada SLTA umum selama pelita V adalah tentang mutu lulusan yang terutama di ukur dari kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan tinggi. Perbedaan ini mengakibatkan akses keperguruan tinggi yang memiliki reportasi yang baik, menjadi tidak merata pula. Dalam kenyataan, hanya sebagian kecil lulusan SMK yang benar-benar memiliki persiapan untuk kerja. Hal ini terjadi karena sistem pendidikan SMK selama ini belum sepenuhnya relevan dengan dunia kerja. Di SMK, tantangan utama yang dihadapi pelita V adalah peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan.

5. Pendidikan Tinggi

Baik PTN maupun PTS sama-sama menghadapi tantangan mengenai masih rendahnya proporsi mahasiswa yang mempelajari bidang teknologi dan MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam), sementara sebagian besar mahasiswa berada pada jurusan/progam studi ilmu-ilmu sosial dan pendidikan. Pembangunan nasional banyak memerlukan lulusan bidang MIPA dan teknologi. Masih tingginya jumlah mahasiswa yang lambat dalam menyelesaikan studi merupakan tantangan lain yang dihadapi. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi eksternal atau (relevansi) yang merupakan tantangan besar. Itulah sebabnya, peningkatan relevansi merupakan prioritas dalam pengembangan dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.

6. Pendidikan Luar Sekolah

Selama pelita V, di perkirakan sebanyak 5,3 juta warga masyarakat telah dibebaskan dari buta huruf. Hasilnya adalah semakin menurunnya jumlah masyarakat yang buta huruf.

7. Tantangan, Kendala dan Peluang

Ada sejumlah tantangan yang di hadapi oleh pembangunan pendidikan Indonesia pada masa-masa selanjutnya, yaitu:

- (a) Belum mempunyai pendidikan mengimbangi perubahan struktur ekonomi dari pertanian tradisional ke industri dan jasa,
- (b) Masih rendahnya relevansi pendidikan,
- (c) Masih rendah dan belum meratanya mutu pendidikan,
- (d) Masih tingginya angka putus sekolah dan tinggal kelas yang mengakibatkan ketidakstabilan dalam penyelenggaraan pendidikan,
- (e) Masih banyaknya kelompok untuk 10 tahun keatas yang buta huruf,
- (f) Masih kurangnya peran serta dunia usaha dalam pendidikan.

Ada kendala yang dihadapi dalam peningkatan kinerja pendidikan nasional, yaitu:

- (a) Dari pihak masyarakat, kendala tersebut adalah kemiskinan dan keterbelakangan yang berkaitan dengan masih rendahnya penghargaan akan pendidikan pada sebagian kelompok masyarakat,
- (b) Terbatasnya jumlah guru yang bermutu disamping penyebarannya yang tidak merata,
- (c) Terbatasnya sarana prasarana, dan
- (d) Manajemen sistem pendidikan yang belum secara terarah menuju peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan.

Adapun peluang yang dimiliki oleh pendidikan nasional adalah:

- (a) Keberhasilan wajib belajar 6 tahun yang memberikan landasan bagi pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun,
- (b) Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan,
- (c) Semakin luasnya sarana komunikasi,
- (d) Semakin tersebar luasnya lembaga pendidikan negeri maupun swasta,
- (e) Adanya UU no 2/1989 tentang sistem pendidikan nasional yang memberikan landasan yang kokoh bagi pendidikan nasional.

Dalam rangka menciptakan sistem pendidikan nasional yang mantap, berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan nasional, serta mampu menjawab tantangan masa kini dan masa depan, pendidikan nasional dewasa ini terus ditata dan dikembangkan

dengan memberikan prioritas pada aspek-aspek yang dipandang strategis bagi masa depan bangsa. Prioritas tersebut adalah pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bersamaan dengan peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan.

D. Kondisi Pendidikan pada Era Globalisasi

Memasuki abad ke- 21 dunia pendidikan di Indonesia menjadi heboh. Kehebohan tersebut bukan disebabkan oleh kehebatan mutu pendidikan nasional tetapi lebih banyak disebabkan karena kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan di Indonesia. Perasaan ini disebabkan karena beberapa hal yang mendasar. Salah satunya adalah memasuki abad ke- 21 gelombang globalisasi dirasakan kuat dan terbuka. Kemajuan teknologi dan perubahan yang terjadi memberikan kesadaran baru bahwa Indonesia tidak lagi berdiri sendiri. Indonesia berada ditengah-tengah dunia yang baru, dunia terbuka sehingga orang bebas membandingkan kehidupan dengan Negara lain. Yang kita rasakan sekarang adalah adanya ketertinggalan di dalam mutu pendidikan. Baik pendidikan formal maupun informal. Dan hasil itu diperoleh setelah kita membandingkannya dengan Negara lain. Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk pembangunan bangsa.

Oleh karena itu, kita seharusnya dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia agar tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia di Negara-negara lain. Setelah kita amati, nampak jelas bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hal itulah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang. Ada banyak penyebab mengapa mutu pendidikan di Indonesia, baik pendidikan formal maupun informal, dinilai rendah. Penyebab rendahnya mutu pendidikan yang akan kami paparkan kali ini adalah masalah pemerataan pendidikan, masalah mutu pendidikan, masalah efisiensi pendidikan, dan masalah relevansi pendidikan. Ada banyak penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, baik pendidikan formal maupun informal.

1. Efektifitas Pendidikan di Indonesia

Pendidikan yang efektif adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, pendidik (dosen, guru, instruktur, dan trainer) dituntut untuk dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat berguna. Efektifitas pendidikan di Indonesia sangat rendah. Setelah praktisi pendidikan melakukan penelitian dan survey ke lapangan, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan.

Hal ini menyebabkan peserta didik dan pendidik tidak tahu “goal” apa yang akan dihasilkan sehingga tidak mempunyai gambaran yang jelas dalam proses pendidikan. Jelas hal ini merupakan masalah terpenting jika kita menginginkan efektifitas pengajaran. Bagaimana mungkin tujuan akan tercapai jika kita tidak tahu apa tujuan kita. Selama ini, banyak pendapat beranggapan bahwa pendidikan formal dinilai hanya menjadi formalitas saja untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia. Tidak peduli bagaimana hasil pembelajaran formal tersebut, yang terpenting adalah telah melaksanakan pendidikan di jenjang yang tinggi dan dapat dianggap hebat oleh masyarakat. Anggapan seperti itu jugalah yang menyebabkan efektifitas pengajaran di Indonesia sangat rendah. Setiap orang mempunyai kelebihan di bidangnya masing-masing dan diharapkan dapat mengambil pendidikan sesuai bakat dan minatnya bukan hanya untuk dianggap hebat oleh orang lain. Dalam pendidikan di sekolah menengah misalnya, seseorang yang mempunyai kelebihan di bidang sosial dan dipaksa mengikuti program studi IPA akan menghasilkan efektifitas pengajaran yang lebih rendah jika dibandingkan peserta didik yang mengikuti program studi yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Hal-hal seperti itulah yang banyak terjadi di Indonesia. Dan sayangnya masalah gengsi tidak kalah pentingnya dalam menyebabkan rendahnya efektifitas pendidikan di Indonesia.

2. Efisiensi Pengajaran di Indonesia

Efisien adalah bagaimana menghasilkan efektifitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih "murah". Dalam proses pendidikan akan jauh lebih baik jika kita memperhitungkan untuk memperoleh hasil yang baik tanpa melupakan proses yang baik

pula. Hal-hal itu jugalah yang kurang jika kita lihat pendidikan di Indonesia. Kita kurang mempertimbangkan prosesnya, hanya bagaimana dapat meraih standar hasil yang telah disepakati. Beberapa masalah efisiensi pengajaran di Indonesia adalah mahal biaya pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, mutu pengajar dan banyak hal lain yang menyebabkan kurang efisiennya proses pendidikan di Indonesia. Yang juga berpengaruh dalam peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik. Masalah mahal biaya pendidikan di Indonesia sudah menjadi rahasia umum bagi kita.

Sebenarnya harga pendidikan di Indonesia relative lebih mahal jika kita bandingkan dengan Negara lain yang tidak mengambil sistem *free cost education*. Namun mengapa kita menganggap pendidikan di Indonesia cukup mahal? Hal itu tidak kami kemukakan di sini jika penghasilan rakyat Indonesia cukup tinggi dan sepadan untuk biaya pendidikan. Jika kita berbicara tentang biaya pendidikan, kita tidak hanya berbicara tentang biaya sekolah, training, kursus atau lembaga pendidikan formal atau informal lain yang dipilih, namun kita juga berbicara tentang properti pendukung seperti buku, dan berbicara tentang biaya transportasi yang ditempuh untuk dapat sampai ke lembaga pengajaran yang kita pilih. Di sekolah dasar negeri, memang benar jika sudah diberlakukan pembebasan biaya pengajaran, namun peserta didik tidak hanya itu saja, kebutuhan lainnya adalah buku teks pengajaran, alat tulis, seragam dan lain sebagainya yang ketika kami survey, hal itu diwajibkan oleh pendidik yang bersangkutan. Yang mengejutkannya lagi, ada pendidik yang mewajibkan les kepada peserta didiknya, yang tentu dengan bayaran untuk pendidik tersebut. Selain masalah mahal biaya pendidikan di Indonesia, masalah lainnya adalah waktu pengajaran.

Dengan survey lapangan, dapat kami lihat bahwa pendidikan tatap muka di Indonesia relative lebih lama jika dibandingkan Negara lain. Dalam pendidikan formal di sekolah menengah misalnya, ada sekolah yang jadwal pengajarannya perhari dimulai dari pukul 07.00 dan diakhiri sampai pukul 16.00. Hal tersebut jelas tidak efisien, karena ketika kami amati lagi, peserta didik yang mengikuti proses pendidikan formal yang menghabiskan banyak waktu tersebut, banyak peserta didik yang mengikuti lembaga pendidikan informal lain seperti les akademis, bahasa, dan sebagainya. Jelas juga terlihat, bahwa proses pendidikan yang lama tersebut tidak efektif juga, Karena

peserta didik akhirnya mengikuti pendidikan informal untuk melengkapi pendidikan formal yang dinilai kurang.

Selain itu, masalah lain efisiensi pengajaran yang akan kami bahas adalah mutu pengajar. Kurangnya mutu pengajar jugalah yang menyebabkan peserta didik kurang mencapai hasil yang diharapkan dan akhirnya mengambil pendidikan tambahan yang juga membutuhkan uang lebih. Yang kami lihat, kurangnya mutu pengajar disebabkan oleh pengajar yang mengajar tidak pada kompetensinya. Misalnya saja, pengajar A mempunyai dasar pendidikan di bidang bahasa, namun di mengajarkan keterampilan, yang sebenarnya bukan kompetensinya. Hal tersebut benar-benar terjadi jika kita melihat kondisi pendidikan di lapangan yang sebenarnya. Hal lain adalah pendidik tidak dapat mengomunikasikan bahan pengajaran dengan baik, sehingga mudah dimengerti dan membuat tertarik peserta didik. Sistem pendidikan yang baik juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pendidikan di Indonesia.

Sangat disayangkan juga sistem pendidikan kita berubah-ubah sehingga membingungkan pendidik dan peserta didik. Dalam beberapa tahun belakangan ini, kita menggunakan sistem pendidikan kurikulum 1994, kurikulum 2004, kurikulum berbasis kompetensi yang mengubah proses pengajaran menjadi proses pendidikan aktif, hingga kurikulum baru lainnya. Ketika mengganti kurikulum, kita juga mengganti cara pendidikan pengajar, dan pengajar harus diberi pelatihan terlebih dahulu yang juga menambah cost biaya pendidikan. Sehingga amat disayangkan jika terlalu sering mengganti kurikulum yang dianggap kurang efektif lalu langsung menggantinya dengan kurikulum yang dinilai lebih efektif.

3. Standarisasi Pendidikan di Indonesia

Jika kita ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, kita juga berbicara tentang standarisasi pengajaran yang kita ambil. Tentunya setelah melewati proses untuk menentukan standar yang akan diambil. Dunia pendidikan terus berubah. Kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat terus-menerus berubah apalagi di dalam dunia terbuka yaitu di dalam dunia modern dalam era globalisasi. Kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang dalam lembaga pendidikan haruslah memenuhi standar. Seperti yang kita lihat sekarang ini, standar dan kompetensi dalam pendidikan formal maupun informal terlihat hanya karangan terhadap standar dan

kompetensi. Kualitas pendidikan diukur oleh standar dan kompetensi di dalam berbagai versi, demikian pula sehingga dibentuk badan-badan baru untuk melaksanakan standarisasi dan kompetensi tersebut seperti Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP).

Tinjauan terhadap sandarisasi dan kompetensi untuk meningkatkan mutu pendidikan akhirnya membawa kami dalam pengungkapan adanya bahaya yang tersembunyi yaitu kemungkinan adanya pendidikan yang terkekang oleh standar kompetensi saja sehingga kehilangan makna dan tujuan pendidikan tersebut. Peserta didik Indonesia terkadang hanya memikirkan bagaimana agar mencapai standar pendidikan saja, bukan bagaimana agar pendidikan yang diambil efektif dan dapat digunakan. Tidak peduli bagaimana cara agar memperoleh hasil atau lebih spesifiknya nilai yang diperoleh, yang terpenting adalah memenuhi nilai diatas standar saja. Hal seperti di atas sangat disayangkan karena berarti pendidikan seperti kehilangan makna saja karena terlalu menuntun standar kompetensi. Hal itu jelas salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia.

Selain itu, akan lebih baik jika kita mempertanyakan kembali apakah standar pendidikan di Indonesia sudah sesuai atau belum. Dalam kasus UAN yang hampir selalu menjadi kontroversi misalnya. Kami menilai adanya sistem evaluasi seperti UAN sudah cukup baik, namun yang kami sayangkan adalah evaluasi pendidikan seperti itu yang menentukan lulus tidaknya peserta didik mengikuti pendidikan, hanya dilaksanakan sekali saja tanpa melihat proses yang dilalui peserta didik yang telah menempuh proses pendidikan selama beberapa tahun. Selain hanya berlangsung sekali, evaluasi seperti itu hanya mengevaluasi 3 bidang studi saja tanpa mengevaluasi bidang studi lain yang telah diikuti oleh peserta didik. Banyak hal lain juga yang sebenarnya dapat kami bahas dalam pembahasan standarisasi pengajaran di Indonesia. Juga permasalahan yang ada di dalamnya, yang tentu lebih banyak, dan membutuhkan penelitian yang lebih dalam lagi. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia juga tentu tidak hanya sebatas yang kami bahas di atas. Banyak hal yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan kita. Tentunya hal seperti itu dapat kita temukan jika kita menggali lebih dalam akar permasalahannya. Dan semoga jika kita mengetahui akar permasalahannya, kita dapat memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia.

BAB III. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendidikan di Indonesia sebelum masa kemerdekaan dibagi atas beberapa zaman, yaitu zaman purba, zaman kerajaan Hindu-Budha, zaman kerajaan Islam, zaman Portugis dan Spanyol, zaman kolonial Belanda, dan zaman kedudukan Jepang. Tujuan pendidikan pada masa ini masih simple dan belum kompleks, yakni pada pemahaman agama, bahasa, termasuk membaca, menulis dan menghitung, serta keterampilan dalam bertahan hidup.
2. Pada periode 1945-1969, pendidikan mulai di sempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Bersamaan dengan berjalannya revolusi fisik, pemerintahan mulai mempersiapkan sistem pendidikan nasional sesuai amanat UUD 1945. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan (PP dan K) mengeluarkan instruksi umum agar para guru membuang sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan patriotisme. Pada masa ini, lahirlah kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar kepada Kewajiban Belajar (KPKPKB), dan Universitas yang ada di Indonesia.
3. Kondisi Pendidikan pada PJP 1 : 1969-1993 mengalami kemajuan yang cukup pesat. Pembangunan jangka panjang pertama, meliputi lima pelita, yaitu pelita I-V yang dimulai pada tahun 1969/1970 hingga tahun 1993/1994 atau 25 tahun. Selama kurun tersebut, pendidikan Indonesia mengalami banyak bahan dan kemajuan, termasuk pada fasependidikan TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, maupun pendidikan luar sekolah.
4. Pada era globalisasi, Pendidikan mengalami kemajuan sangat pesat. Namun di era pesatnya Pendidikan pada masa sekarang, Indonesia masih berada di bawah negara-negara lain. Terdapat beberapa faktor penyebab rendahnya mutu Pendidikan di Indonesia, diantaranya : rendahnya efektifitas, efisiensi dan standarisasi Pendidikan di Indonesia.

DAFTAR KAJIAN KEPUSTAKAAN

- Abduhak,Ishak;Supriyadi;Wahyudin,Dinn,2007,PengantarPendidikan,Jakarta:Universitas Terbuka.
- A.M.Irfan Taufan Asfar, A.M.Iqbal Akbar Asfar, “PENDIDIKAN MASA RENAISSANCE: Pemikiran dan Pengaruh Keilmuan”.
- Okhaifi Prasetyo, “Pendidikan Indonesia Pada Masa Prasejarah Dan Hindu-Budha”, Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan, 8 (2), 2021, Hal. 180.
- Muhammad Rifa’i, Sejarah Pendidikan Nasional Dari Masa Klasik Hingga Modern (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011).
- Uyoh Sadulloh and Ocih Setiasih, “Landasan Historis Pendidikan,” Landasan Pendidikan (2016): 206.
- Salsabiil Rihhadatul Aisy, Hudaidah. “Pendidikan Indonesia di Era Awal Kemerdekaan Sampai Orde Lama”. Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 3 No 2 Tahun 2021